



**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

Mata Kuliah	Kode MK	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tanggal Penyusunan
HUKUM TATA NEGARA	FHIH.03	Mata Kuliah Keahlian Prodi	3 SKS	III (TIGA)	01 Februari 2017
	Dosen Pengembang RPS		Dosen pengampu		Ketua Prodi
	 NURJALAL, S.H., M.H.		 NURJALAL, S.H., M.H.		 YULI HERIYANTI, S.H., M.H.
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL Prodi	CP-MK			
Deskripsi Singkat MK	Mata Kuliah Ini Membahas Tentang organisasi negara, hubungan antar alat negara secara vertikal & horizontal, serta kedudukan warga negara & hak-hak asasinya.				
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	Mata Kuliah Memuat Bahan Ajar Tentang Pengertian Hukum Tata Negara, Kedudukan HTN Dalam Klasifikasi Hukum, Hubungan HTN Dengan Ilmu Negara, Ilmu Politik Dan Hukum Administrasi Negara, Sumber Hukum HTN, Sistem Pemerintahan Indonesia, UUD 1945, Otonomi Daerah, Lembaga Negara Dan Pemilu				
Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Moh. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, <i>Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara</i>, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.</li> <li>2. Andi Muspari Pide, 1999, <i>Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia</i>, Gaya Media Pratama, Jakarta</li> <li>3. Soehino, 1985 <i>Sumber – sumber Hukum Tata Negara Indonesia</i>, Liberty, Yogyakarta.</li> <li>4. C.S.T.Kansil, 1992 <i>Pengantar Ilmu Hukum</i>, Balai Pustaka Jakarta.</li> <li>5. Ni'matul Huda, 2002, <i>Hukum Tata Negara Indonesia</i>, Ull, Yogyakarta</li> <li>6. Maria Farida.Indarti, 1999,<i>Ilmu Perundang – undangan; Dasar – dasar Pembentukannya, Sekretariat Konsorsium Ilmu Hukum</i>, UI, Jakarta.</li> <li>7. J.C.T Simorangkir, 1984,<i>Penetapan UUD dilihat dari segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia</i>, Gunung Agung, Jakarta.</li> <li>8. Yusril Ihza Mahendra, 1996, <i>Dinamika Tata Negara Indonesia</i>, Gema Insani Press, Jakarta.</li> <li>9. Arend Lijphart, 1995, <i>Sistem Pemerintahan Parlemen dan Presidensial</i>, Rajawali, Press, Jakarta.</li> <li>10. Moh. Mahfud MD, 1998, <i>Politik Hukum Indonesia</i>, LP3ES, Jakarta.</li> <li>11. Herman Sihombing, 1996, <i>Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia</i>, Penerbit Djambatan, Jakarta.</li> <li>12. Mestika Zed, 1997, <i>Pemerintahan Darurat Republik Indonesia</i>, Grafika Press, Jakarta.</li> <li>13. Sarundajang, 1999, <i>Arus Balik Pemerintahan Pusat ke Daerah</i>, Sinar Harapan, Jakarta.</li> <li>14. The Liang Gie,1993, <i>Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di negara RI Jilid I,II dan III</i>, Liberty, Yogyakarta.</li> <li>15. Suharizal, 2002, <i>Reformasi Konstitusi 1998 – 2002 (Pergulatan Konsep dan Pemikiran Amandemen UUD 1945)</i>, Anggrek Law Firm, Padang.</li> <li>16. Jimly Asshidiqie, 2004, <i>Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945</i>, Cetakan I, FH UII Press, Yogyakarta</li> <li>17. -----, 2005, <i>Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi</i>. Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan MK RI</li> <li>18. Firmansyah Arifin, 2005, <i>Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga</i>. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional</li> <li>19. Bagir Manan, 2005, <i>Perkembangan dan Pemikiran dan Pengaturan HAM Di Indonesia</i></li> </ol>				

Media Pembelajaran	<i>White board, spidol, Laptop, LCD dan multi media class equip ment</i>				
Team Teaching					
Matakuliah Prasyarat					
Minggu Ke-	Kemampuan Akhir yang diharapkan (Sub-CP MK)	Indikator	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Kriteria, Bentuk dan Bobot Penilaian
1	Mahasiswa Mampu Menjelaskan Istilah Dan Pengertian Hukum Tata Negara, Kedudukan HTN Dalam Kurikulum Fakultas Hukum Serta Mampu Menjelaskan Tentang Batasan Dan Objek HTN	PENGANTAR 1. Istilah Dan Pengertian Hukum Tata Negara 2. Kedudukan HTN Dalam Kurikulum Fakultas Hukum 3. Batasan Dan Objek Kajian HTN	Pengertian Hukum Tata Negara	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
2	a. Mahasiswa Mampu Menguraikan Dan Menjelaskan Metode Mempelajari HTN b. Mahasiswa Mampu Menganalisa Metode Yang Cocok Digunakan Untuk Mempelajari HTN	PENGANTAR Metode Mempelajari HTN	Metode Mempelajari HTN	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
3	Mahasiswa Mampu Menguraikan Dan Menjelaskan Kedudukan HTN Dalam Klasifikasi Hukum, Hubungan HTN Dengan Ilmu Negara, Ilmu Politik Dan Hukum Administrasi Negara	PENGANTAR 1. Kedudukan HTN Dalam Klasifikasi Hukum 2. Hubungan HTN Dengan Ilmu Negara, Ilmu Politik Dan Hukum Administrasi Negara	Kedudukan HTN Dalam Klasifikasi Hukum, Hubungan HTN Dengan Ilmu Negara, Ilmu Politik Dan Hukum Administrasi Negara	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
4	Mahasiswa Mampu Memahami, Menguraikan Dan Menjelaskan Istilah Dan Pengertian Sumber Hukum, Penggolongan Sumber Hukum Dan Sumber Hukum Tata Negara	SUMBER HUKUM TATA NEGARA 1. Istilah Dan Pengertian Sumber Hukum 2. Penggolongan Sumber Hukum 3. Sumber Hukum Tata Negara	Istilah Dan Pengertian Sumber Hukum, Penggolongan Sumber Hukum Dan Sumber Hukum Tata Negara	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
5	Mahasiswa Mampu Menguraikan Dan Menjelaskan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Sumber Hukum Tata Negara	SUMBER HUKUM TATA NEGARA Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan 1. TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 2. TAP MPR No. III/MPR/2000 3. UU No.10 Tahun 2004	Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Sumber Hukum Tata Negara	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah

6	Mahasiswa Mampu Menguraikan Serta Menjelaskan Pengertian Sistem Pemerintahan Dan Macam-Macam Sistem Pemerintahan	SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA 1. Pengertian Sistem Pemerintahan 2. Pembagian Sistem Pemerintahan	Pengertian Sistem Pemerintahan Dan Macam-Macam Sistem Pemerintahan	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
7	Mahasiswa Mampu Menguraikan Dan Menjelaskan Sistem Pemerintahan Di Indonesia Berdasarkan Konstitusi Yang Pernah Berlaku	SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA Sistem Pemerintahan Indonesia 1. KRIS 1949 2. UUDS 1950	Sistem Pemerintahan Di Indonesia Berdasarkan Konstitusi Yang Pernah Berlaku	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
8	Ujian Tengah Semester				
9	Mahasiswa Mampu Menguraikan Dan Menjelaskan Sistem Pemerintahan Di Indonesia Berdasarkan Konstitusi Yang Pernah Berlaku	SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA Sistem Pemerintahan Indonesia 1. UUD 1945 Sebelum Perubahan 2. UUD 1945 Setelah Perubahan	Sistem Pemerintahan Di Indonesia Berdasarkan Konstitusi Yang Pernah Berlaku	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
10	Mahasiswa Dapat Menjelaskan Proklamasi, Penyusunan UUD 1945, KRIS 1949, UUDS 1950 Dan Pemerintahan Darurat RI Dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959	SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA 1. Proklamasi 2. Penyusunan UUD 1945, KRIS 1949 Dan UUDS 1950 3. Pemerintahan Darurat RI 4. Dekrit Presiden 5 Juli 1959	Proklamasi, Penyusunan UUD 1945, KRIS 1949, UUDS 1950 Dan Pemerintahan Darurat RI Dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
11	Mahasiswa Mampu Menjelaskan Pelaksanaan UUD 1945	SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA Pelaksanaan UUD 1945 1. Orde Lama ( 1959-1965) 2. Orde Baru ( 1966-1998) 3. Era Reformasi ( 1998-Sekarang)	Pelaksanaan UUD 1945	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
12	Mahasiswa Dapat Menjelaskan Pengertian Hukum Tata Negara Darurat, Dasar Hukum Hukum Tata Negara Darurat, Kekuasaan Dan Kedudukan Penguasa Darurat.	HUKUM TATA NEGARA DARURAT 1. Pengertian Hukum Tata Negara Darurat 2. Dasar Hukum Hukum Tata Negara Darurat 3. Kekuasaan Dan Kedudukan Penguasa Darurat.	Hukum Tata Negara Darurat, Dasar Hukum Hukum Tata Negara Darurat, Kekuasaan Dan Kedudukan Penguasa Darurat.	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
13	Mahasiswa Mampu	HUKUM TATA NEGARA	Amandemen UUD 1945	1. Ceramah	1. Test

	Menguraikan Dan Menjelaskan Amandemen UUD 1945	TERKAIT Amandemen UUD 1945		2. Tanya Jawab 3. Diskusi	2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
14	Mahasiswa Mampu Menguraikan Dan Menjelaskan Hak Azazi Manusia Dan Kewarganegaraan	HUKUM TATA NEGARA TERKAIT Hak Azazi Manusia Dan Kewarganegaraan	Hak Azazi Manusia Dan Kewarganegaraan	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
15	Mahasiswa Mampu Menguraikan Dan Menjelaskan Pemerintah Daerah Dan Otonomi Daerah, Lembaga Negara Dan Pemilu	HUKUM TATA NEGARA TERKAIT Pemerintah Daerah Dan Otonomi Daerah, Lembaga Negara Dan Pemilu	Pemerintah Daerah Dan Otonomi Daerah, Dan Lembaga Negara Dan Pemilu	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
16	Ujian Akhir Semester				